

**TINJAUAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK BISNIS
WARALABA (*FRANCHISE*) MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR
: 459/Pid.SUS/2018/PN.JKT.SEL)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024**

HALAMAN PESETUJUAN

**TINJAUAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK BISNIS
WARALABA (*FRANCHISE*) MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR
: 459/Pid.SUS/2018/PN.JKT.SEL)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum

Disusun oleh :

Rose Mistika Ina Menun Ongebele

19.C1.0036

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Emilia Metta Karunia Wijaya S.H., M.H

NPP: 058.1.2022.407

Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum

NPP.05811986019

Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2024

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang berada di sekitar manusia mengalami perubahan yang sangat besar dalam perkembangannya, yang awalnya hanya ada di sebuah negara namun sekarang ini sudah ada di seluruh penjuru dunia. Hal seperti ini menjadikan teknologi sebagai wadah informasi yang sangat besar bagi masyarakat di seluruh dunia, dikarenakan adanya globalisasi yang sudah sangat berkembang di antara masyarakat dunia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dan analisis dilakukan secara kualitatif tanpa menggunakan suatu perhitungan secara matematis. Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka.

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana penipuan berkedok bisnis franchise melalui media sosial hampir sama dengan tindak pidana penipuan pada umumnya yang membedakan hanya terletak pada alat bukti dan barang bukti yang menggunakan sistem elektronik, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada putusan nomor 459/Pid.Sus/2018/PN Jkt.sel Hakim belum memperhatikan asas keadilan dikarenakan hak dari korban belum terpenuhi haknya dikarenakan kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa sangat banyak dan tidak sesuai dengan pidana pokok yang dijatuhkan oleh Hakim

Saran Penulis Pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait sebaiknya dapat mengikutsertakan para aparat penegak hukum dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan secara khusus untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus *cybercrime*. Pertimbangan Hakim harus memenuhi tiga asas, yakni asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Hakim harus memberikan vonis terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok bisnis *franchise* melalui media sosial seadil-adilnya dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa minimal terdapat dua alat bukti, hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penipuan, Franchise, Media Sosial